

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*.
- Asyhadie, Z. (2008). *Hukum Bisnis (Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bahsan, M. (2007). *Hukum jaminan dan jaminan kredit perbankan Indonesia*.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan fidusia*.
- Hasan, D. (1996). *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi PenerapanAsas Pemisahan Horisontal*. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2015). *Pengantar ilmu hukum ed.revisi/*.
- Miru, A., & Yodo, S. (2004). *Hukum perlindungan konsumen*.
- Moleong, Lexy J., M.A, P. D. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Muhtarom, M. (2014). *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*.
- Prajitno, A. A. A. (2010). *Pengetahuan praktis tentang apa dan siapa notaris di Indonesia?* Putra Media Nusantara.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Perbuatan melanggar hukum : dipandang dari sudut hukum perdata*.
- I Made Pasek Diantha, S. H. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*
- Rahardjo, S., Dimiyati, K., & Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2004). *Ilmu hukum : pencarian, pembebasan dan pencerahan*.
- Rukin. (2021). *Metode Penelitan Kualitatif Edisi Revisi*.
- Salim H. S. (n.d.). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*.
- Satrio, J. (2002a). *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan fidusia*. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R., & Simanjuntak, P. N. H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta.

Suharnoko. (2004). *Hukum perjanjian : teori dan analisa kasus*.

Suriasumantri, J. S. (Jujun S. (1999). *Ilmu dalam perspektif*.

Suryabrata, S. (n.d.). *Metodologi penelitian*.

Tjitrosudibio, R. d, & Subekti, R. (2002). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta, Pradya Paramita*.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen Ke IV.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

C. Sumber Lain

Almira Jasmine, 181000370. (2022). *KEKUATAN EKSEKUTORIAL PERJANJIAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA*.

Dewi, C. I. D. L. (2019). Pengikatan Jaminan Kebendaan Dengan Fidusia. *Jurnal Yustitia*.

DEWI, P. E. K. (2389). KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM SISTEM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK. *JURNAL KERTHA WICAKSANA*.

Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2019). Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Litigasi*.

Febriansyah, F. P., & Purwoto, R. (2016). TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA.

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara.*

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN / JURNAL LITIGASI.

Hutapea, E. R. (2009). *Upaya Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.*

Jasmine, A. (2021). *Kekuatan Pengikatan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Jaminan Fidusia.*

Khairandy, R. (1997). Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi: Suatu Tinjauan Hukum.

Kumaladewi, N. A. (2015). *Eksekusi kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang berada pada pihak ketiga.* Sebelas Maret University.

Muryati, D. T., & Heryanti, B. R. (2011). Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan.

PAPARANG, F. (2014). IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI INDONESIA.

Pardede, M. (2006). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia.

Patrik, P., & Kashadi, K. (2009). Hukum Jaminan. Semarang: UNDIP.

Rasudin, N., Hasanah, U., Ismi, H., & Frizcha Sari, A. (2022). REKONSTRUKSI KEDUDUKAN AKTA FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TENTANG EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA. *JURNAL RISET INDRAGIRI.*

Rusli, H., Widjaja, G., & Sullivan, R. (2004). *Tinjauan yuridis perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi (financial lease) dalam perspektif hukum positif Indonesia.*

Sanusi, A. (2017). PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN AKIBAT

HUKUMNYA (Suatu Tinjauan Normatif) THE REGISTRATION OF FIDUCIARY AND THE LEGAL CONSEQUENCES (A Review of Normative). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.

Satrio, J. (2002b). Janji-janji (Bedingeng) dalam Akta Hipotek dan Hak Tanggungan. *Media Notariat Edition January–March, Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia*.

Setyaji, A. A. B. (2018). *KORELASI KEDUDUKAN KREDITOR PREFERENT DAN KREDITOR KONKURENT TERHADAP DEBITOR DALAM PERJANJIAN UTANG – PIUTANG DENGAN JAMINAN BENDA BERGERAK DAN BENDA TIDAK BERGERAK*.

Situmorang, R., Purba, H., Harianto, D., Devi, K., Mansur No, J. T., & Medan Baru, K. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI FIDUSIA TERKAIT PENCANTUMAN KLAUSUL YANG BERPOTENSI MERUGIKAN PEMBERI FIDUSIA DALAM PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA. (STUDI PADA PT. CAPELLA MULTIDANA CABANG MEDAN). *BULETIN KONSTITUSI*.

Subijanto, S. (Subijanto). (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*.

Sumantry, D., & Muhammad. (2019). *Responsibility of Auction Services (Kpknl) for the Loss of Tender*.

Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi.

Tobing, G. H. S. L. (1983). *Peraturan jabatan notaris (notaris regelement)*. Erlangga.

Tutik, T. T. (2008). *Hukum perdata dalam sistem hukum nasional/Titik Triwulan Titik*.

WIDJANARTO, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK ATAS MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK.

Winarno, J., & Winarno, J. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia.